

Judul : Pilih Opsi Restrukturisasi Utang, MANAJEMEN GARUDA PEDE "SI BURUNG BESI" SELAMAT
Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Pilih Opsi Restrukturisasi Utang

Manajemen Garuda Pede "Si Burung Besi" Selamat

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk cenderung memilih opsi melakukan restrukturisasi utang untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian, sejumlah politisi Senayan meragukan pilihan tersebut.

DIREKTUR Utama Garuda Indonesia Irfan Setiapatra mengungkapkan, Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) beberapa waktu lalu mengeluarkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia. Dan, perseroan cenderung memilih opsi restrukturisasi. Sebab, ada utang yang sudah jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun. Dalam proses restrukturisasi tersebut, perseroan ingin mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"PKPU itu bukan kebangkrutan. Itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan juga pailit," ujar Irfan dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (21/6).

Ia mengakui, dalam skema PKPU memang ada risiko pailit atau bangkrut. Sebab, dalam aturan PKPU, jika dalam 270 hari atau sembilan bulan tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dari debitor dan kreditor, maka perusahaan otomatis pailit. "Artinya, selalu ada risiko un-

tuk menjadi pailit ketika masuk PKPU," terangnya.

Meski demikian, lanjutnya, harus ada keyakinan dan kepastian mengenai penyelesaian negosiasi terhadap utang piutang. Dia meyakini bahwa lewat restrukturisasi, permasalahan utang akan selesai. Hal ini diharapkan disepakati juga oleh kreditor Garuda.

"Karena kreditor mesti punya keyakinan, kalau dia mengorbankan tagihan, Garuda akan *sustain for longer time*," tutur Irfan.

Dengan dasar tersebut, lanjut Irfan, perseroan juga harus memiliki proposal yang ditawarkan ke kreditor terkait instrumen restrukturisasi. Dalam proposal itu, ada kemungkinan skema restrukturisasi dilakukan dengan cara menukar atau mengkonversi utang menjadi saham kepemilikan (*debt to equity swap*). Namun, hal ini sangat bergantung pada pemegang saham *existing*. Karena dengan adanya pemegang saham baru, maka akan

membuat kepemilikan saham di Garuda terdilusi atau berkurang.

"Ini lah yang bisa saja jadi penawaran, tetapi harus menunggu persetujuan pemegang saham. Sehingga masih melihat proposal apa yang nanti diajukan oleh kami dengan para *advisor*," bebarnya.

Untuk itu, Irfan berharap, Komisi VI DPR mendukung langkah Garuda karena hal ini berkaitan dengan jumlah kepemilikan saham.

Dia mengingatkan, proses negosiasi dan PKPU tidak bisa lewat dari tahun ini.

"Makanya, ini (opsi restrukturisasi utang) yang kami targetkan," tekannya.

Mengingat utang ini tidak mungkin ditanggung pemerintah, Irfan optimistis, Garuda Indonesia masih bisa selamat.

"Ini memang opsi yang paling rasional. Hitung-hitungan ini makin mendekati keyakinan bahwa kalau kita eksekusi dengan baik, bisa mendapatkan hasil negosiasi dengan kreditor," katanya.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyarankan, Garuda tidak memilih opsi restrukturisasi. Tetapi, opsi dukungan pemerintah berupa suntikan ekuitas atau pinjaman.

"Andai nanti Garuda ambil

opsi dua (restrukturisasi), kalau saya nggak yakin (bisa menyelamatkan perusahaan). Kalau opsi satu, baru (saya) yakin 100 persen bisa selamat," cetusnya.

Politikus dari Fraksi Golkar ini khawatir atas konsekuensi yang akan terjadi, bila perusahaan gagal melakukan restrukturisasi utangnya. Yakni, perusahaan bisa pailit.

"Berapa lama masalah ini bisa selesai? Apa konsekuensinya kalau nggak selesai? Anda sanggup menghidupkan Garuda lagi kalau sudah kadung mati?" cecarnya.

Pasalnya, menurutnya, proses negosiasi dengan *lessor* memakan waktu. Selain itu, para *lessor* juga belum pasti menerima tawaran untuk mengalihkan utangnya menjadi kepemilikan saham di Garuda Indonesia.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menuturkan, melihat dari sejarahnya, Garuda Indonesia sudah berkali-kali melakukan restrukturisasi utang dan selalu berhasil.

Hal itu terjadi karena ada *back up* dari pemerintah sebagai pemilik saham. Apalagi di masa depan, penerbangan di Indonesia masih sangat bagus setelah pandemi selesai.

Ia menilai, baik manajemen maupun pemegang saham tak akan mengambil langkah yang

bisa membuat perusahaan pailit. Mengingat, kepemilikan Garuda mayoritas dipegang pemerintah.

"Kalau nanti jadi ke PKPU, harus terlihat *goodwill* pemerintah untuk menyelamatkan Garuda. Sehingga menambah kepercayaan pada pemberi utang dan Garuda tidak dipailitkan," katanya kepada *Rakyat Merdeka*.

Selain itu, Garuda dan pemerintah juga harus memberi keyakinan pada *lessor* bahwa *lessor* pun sebenarnya membutuhkan Garuda. Sebab, ketika maskapai mulai mengembalikan pesawat yang disewanya, hal itu justru membebani *lessor* atas biaya perawatan.

Gatot optimistis, "Si Burung Besi" kebanggaan rakyat Indonesia itu, bisa diselamatkan dan melalui masa berat akibat pandemi ini. Sebab, sejarah serta tugas dan fungsinya yang sangat vital.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN menyiapkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia. Selain dua opsi tersebut, opsi ketiga juga terkait restrukturisasi. Namun yang direstrukturisasi adalah perusahaan, bukan utang. Artinya, akan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Sedangkan opsi keempat, Garuda Indonesia dilikuidasi dan posisinya akan digantikan oleh swasta. ■ IMA